

Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid 19 di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir

Siti Maryam¹, Evita Ayu Candra²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Article Info

Article history:

Received : 7 Juni 2022

Publish: 10 Juli 2022

Keywords:

Evaluation

BNPT Program

Pulung Rejo Village

Abstract

The location of the research was carried out in the village of Pulung Rejo, Rimbo Ilir sub-district. This study lasted for 1 month, namely on December 23, 2020 to January 23, 2021. This study aims to find out the regulation of the Minister of Social Affairs Number 20 of 2019, concerning the Distribution of Non-Cash Food Assistance (BPNT) for beneficiary communities in Pulung Rejo Village and to evaluate implementation, constraints and efforts in the Evaluation of the Non-Cash Food Aid (BPNT) Distribution Program for Poor Community Groups in the Era of the Covid-19 Pandemic in Pulung Rejo Village, Rimbo Ilir District in 2020. This study used a qualitative method. The results showed that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Distribution Program (BPNT) was not optimal and not well targeted. Obstacles in the implementation of the Non-Cash Food Aid (BPNT) Distribution program to Poor Community Groups in the Covid-19 Pandemic Era in Pulung Rejo Village, Rimbo Ilir District, namely (1) Social service and community participation is still lacking (2) Distribution of basic food assistance or food assistance programs Non-Cash (BPNT) that does not comply with the provisions. (3) Beneficiary families who do not meet the criteria. Efforts were made to overcome these obstacles, namely (1) through a preventive approach and social communication between social services, villages and the community (2) Village government Provide confidence and explanation that non-cash food assistance (BPNT) is assistance provided by the government with the aim of improving nutrition. This means that it is in the form of basic necessities (3) TKSK efforts to verify and validate data means to match existing data with reality by going directly to the field

Info Artikel

Article history:

Received : 7 Juni 2022

Publish: 10 Juli 2022

ABSTRACT

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa pulung rejo kecamatan rimbo ilir. Penelitian ini berlangsung selama 1 bulan yaitu pada tanggal 23 Desember 2020 sampai 23 Januari 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan menteri sosial Nomor 20 tahun 2019, Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi masyarakat penerima manfaat di desa pulung rejo serta untuk mengevaluasi pelaksanaan, kendala dan upaya dalam Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid-19 di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum optimal dan tidak tepat sasaran. Kendala dalam pelaksanaan program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid-19 di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir yaitu (1) Partisipasi dinas sosial dan masyarakat masih kurang (2) Penyaluran bantuan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tak sesuai ketentuan. (3) Keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu (1) melalui pendekatan preventif dan komunikasi sosial antara dinas sosial, desa dan masyarakat (2) Pemerintah desa Memberikan keyakinan dan penjelasan bahwa bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan perbaikan gizi. Artinya berupa sembako (3) Upaya TKSK verifikasi dan validasi data artinya mencocokkan data yang ada dengan kenyataan dengan terjun langsung kelapangan

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Siti Maryam,

Universitas Muara Bungo

Email: sitimaryamumb201@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia membuat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yaitu dengan membuat program yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kabupaten Tebo merupakan salah satu dari 7 Kecamatan yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai semenjak tiga tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2017 saat pertama kali program bantuan pangan secara non tunai di lakukan. Salah satunya di Kecamatan Rimbo Ilir terdapat 2.313 KPM yang tersebar di 9 Desa, salah satunya di Desa Pulung Rejo yaitu terdapat 269 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 6 Dusun yang berada di wilayah Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara-negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai. Hal ini, karena masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keaggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena mampu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank.

Pada awalnya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Bantuan Pangan Non Tunai bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun dalam pelaksanaan program bantuan

pangan non tunai yang sudah berlangsung selama hampir 3 tahun ini terjadi beberapa masalah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu:

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan Kriteria

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibuat dengan tujuan untuk mengurangi beban pangan masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang menjadi acuan menentukan keluarga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial. Namun dalam penyelenggaraannya terdapat sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memenuhi kriteria.

2. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak sesuai dengan aturan.

Pelaksana pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus memiliki karakteristik yang taat terhadap aturan yang berlaku. Ketegasan pelaksana kebijakan masih terbilang belum maksimal. Pelaksana kebijakan tidak tegas dengan pelanggaran yang ditemukannya, yaitu dalam Pedoman Umum program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijelaskan bahwa salah satu dari prinsip utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta dapat memilih bahan pangan sesuai dengan preferensi (bahan pangan tidak dipaketkan dan dapat memilih).

Berdasarkan data yang tercatat di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo sampai tahun 2020 jumlah penduduk 26.762. dari jumlah tersebut yang belum memperoleh bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 665 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan wilayah Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2020

No	Kecamatan Rimbo Ilir	Jumlah Penduduk Desa Rimbo Ilir	Kelompok yang berhak Penerima Bantuan	Warga Miskin Mendapat Bantuan	Warga Miskin Belum Mendapat Bantuan
1	Sido Rejo	2179	173	51	122
2	Pulung Rejo	2593	190	50	140
3	Karang Dadi	3411	190	75	115
4	Giri Purno	2635	165	140	25
5	Sumber Agung	2524	175	128	47
6	Sari Mulya	4801	215	181	34
7	Giri Winangun	5690	280	193	87
8	Sepakat Bersatu	1297	85	50	50
9	Rantau Kembang	1632	105	60	45
	Jumlah	26.762	1.578	928	665

Sumber: Kantor camat, TKSK Kecamatan Rimbo Ilir, 2020

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Rimbo Ilir sebanyak 26.762, dengan total penerima bantuan sebanyak 1.578 orang dengan rincian yang telah menerima bantuan sebanyak 928 orang dan yang belum menerima bantuan sebanyak 665 orang. Untuk pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Rimbo Ilir dimasing-masing desa yang belum didistribusikan paling banyak terdapat di Desa Pulung Rejo dengan jumlah kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan 190 orang, untuk jumlah masyarakat miskin yang telah menerima bantuan berjumlah 50 dan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sebanyak 140 orang.

Adapun yang menjadi prinsip Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagian kurang terlaksana dengan baik, berdasarkan fakta tersebut maka penelitian ini sangat penting mengingat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan

waktu penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk memastikan keberhasilan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dilihat dari Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid-19 di lapangan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) PADA KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN DI ERA PANDEMI COVID-19 DI DESA PULUNG REJO KECAMATAN RIMBO ILIR”**.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini merupakan penelitian pada proses dan makna, maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud lebih menekankan pada sifat naturalisme, yaitu realita yang muncul dan mendasar pada peristiwa-peristiwa nyata yang menjadi bahan kajian dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya penelitian kualitatif dipilih krena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif (Afifudin dan Saebani, 2018).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid-19 bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjangring realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkompeten dalam Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid-19 dalam hal ini Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk tabel, statistik, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada kelompok Masyarakat Miskin di Era Pandemi Covid -19.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka (Afifudin dan Saebani, 2018). Garret memberikan suatu perumusan yang sederhana, dengan menyatakan, bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi (Afifudin dan Saebani, 2018).

b. Observasi

Observasi adalah disamping wawancara data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini observasi adalah pengamatan dan

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian (Afifudin dan Saebani, 2018).

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data di dapat secara langsung dengan apa yang dilihat pada lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Selain dengan metode observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode *library research* yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.

Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah: *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek penelitian.

Sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif. Hal ini karena pada pendekatan kualitatif penekanan pemilihan sampel atau responden didasarkan pada kualitasnya, bukan jumlahnya. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih sampel merupakan salah satu kunci keberhasilan utama untuk menghasilkan penelitian yang baik. Sampel juga dipandang sebagai sampel teoritis dan tidak representatif (Afifudin dan Saebani, 2018).

Informan yang dipilih sebagai sumber informasi dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

NO	Nama	Pekerjaan	Jumlah
1	Erlynda,S.Sos	Kepala Dinas Sosial	1
2	Maryanti	Kasi Sosial Budaya	1
3	Sutarjo	Petugas TKSK	1
4	Warsino	Kepala Desa	1
6	Dani Sartika	Agen e-warong	1
7	Duriyanti	Masyarakat kaya mendapat bantuan	1
8	Wagiman	Masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan	1
9	Irawan	Masyarakat yang mendapat bantuan	1
Jumlah			8

Menurut afifudin, Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dari tema dan hipotesis. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentarpeneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis adalah mengatur, mengurutkan mengelompokkan, member kode dan mengkategorikannya (Afifudin dan Saebani, 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masyarakat Miskin Di Era Pandemi Covid 19 Di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir

Program BPNT merupakan tindakan atau langkah yang merupakan operasionalisasi misi, tujuan strategi dan kebijakan. Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Widodo pada rapat terbatas tentang Program Raskin Pada juli 2016, penyaluran Raskin diganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan.

Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi.

Kelompok masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.

3.2. Kriteria penerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa pulung rejo

Penerima bantuan TKSK mereka yang tidak terdaftar di bantuan sosial (bansos), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan partisipasi pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat melalui menteri sosial yang mekanisme di atur dalam peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 20 tahun 2019 pada bab 2 pasal 3,4 dan 5. Mereka yang tidak memiliki KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bukanlah menjadi prioritas utama melainkan mereka dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari dat terpadu kesejahteraan sosial dengan memiliki rekening.

Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat desa pulung rejo dinilai lebih efisien di tengah pandemi corona bagi mereka yang kehilangan mata pencarian, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan bagi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya yang dapat dijadikan sebagai tambahan nutrisi melalui pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga masyarakat memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat desa pulung rejo untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur .

Dengan adanya pemberian edukasi terhadap perangkat desa dan TKSK diharapkan bisa memberikan acuan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memberikan pemahaman dan persamaan persepsi kepada aparat pemerintah desa dan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengenai pendayagunaan, menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan memberikan arah bagi pelaksanaan kewenangan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan.

3.3. Pelaksanaan evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa pulung rejo

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Sedangkan Pelaksanaan evaluasi adalah tindakan kegiatan atau usaha untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memperoleh tindakan dan tujuan informasi yang akurat dan objektif dalam suatu program evaluasi. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efesiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program dalam pelaksanaan itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program pelaksanaan berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program pelaksanaan kedepan.

Dari data Kantor Camat, TKSK Kecamatan Rimbo Ilir dengan jumlah penduduk 2593 orang. Kelompok yang berhak menerima bantuan sebanyak 190 orang, sedangkan yang mendapat

hanya 50 orang. Artinya 140 orang belum mendapat bantuan. Dengan arti kata lain dari setiap RT hanya mendapat lebih kurang 2 orang. Dalam target pendataan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kepala desa mendata dengan keseluruhan warganya tanpa dengan kriteria, namun setelah ada pendataan dari TKS K ternyata kelompok warga miskin yang menerima bantuan hanya mendapat 50 orang dari 140 orang artinya 140 yang dianggap warga miskin BPNT tidak layak unruk menerima dikarenakan mereka masih mampu memenuhi kehidupan sehari-harinya dalam pemenuhan nutrisinya.

TKSK sudah berjalan sesuai tupoksi dalam menjalankan tugasnya dengan langsung terjun ke lapangan untuk membuktikan data yang sebenarnya sesuai atau tidak. Pendataan ulang itu sangat dibutuhkan mengingat agar bantuan tepat sasaran tidak disalah gunakan. Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dinas Sosial telah bekerjasama dengan TKS K dalam menjalankan program pemerintah khususnya dalam peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar berjalan sesuai dengan tujuan. Keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu bapak sugiman adalah warga yang benar masuk dalam kriteria sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) namun pada kenyataannya beliau tidak mendapatkan. Praktek nepotisme masih dapat ditemui di desa pulung rejo dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini terlihat dari keterangan ibu duriyanti orang kaya yang mendapat bantuan. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan TKS K masih belum berjalan efektif.

TKSK sudah melakukan kinerjanya dengan baik. Pendataan ulang melalui verifikasi dan validasi data dilakukan untuk agar pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tepat sasaran. Verifikasi dan validasi data yang dilakukan TKS K bukan saja berupa salah sasaran, namun verifikasi dan validasi data juga digunakan untuk bagi warga masyarakat yang pindah, maupun meninggal.

3.4. Kendala dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Masyarakat Miskin Di Era Pandemi Covid 19 di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir

Kendala merupakan halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran atau kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Kendala Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Partisipasi Dinas Sosial dan masyarakat masih kurang. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program dari pemerintah melalui PerMenSos No 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan suatu hal baru dengan menggunakan elektrik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk edukasi sosialisasi. Kepala desa telah melakukan sosialisasi dengan mengajak semua unsur-unsur perangkat desa beserta masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan intansi Dinas Sosial namun bagian dari mereka tidak dapat mengikuti dalam acara sosialisasi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan alasan suatu hal. Artinya pelaksanaan sosialisasi dalam partiipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal.
2. Pemerintah desa telah memberikan undangan kepada penerima bantuan pangan Non Tunai (BPNT) namun pelaksanaannya mendapatkan kendala. Sosialisasi edukasi dipandang tidak begitu penting bagi masyarakat. sosialisasi edukasi merupakan suatu hal yang sangat terpenting, yang dapat dimungkinkan terwujudnya dari suatu pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan adanya berbagai unsur elemen diharapkan mampu memberikan kontribusi edukasi dalam pemanfaatan, penggunaan khususnya dalam pemakaian kartu elektrik.
3. Penyaluran bantuan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tak sesuai ketentuan. Seharusnya, KPM punya keleluasaan memilih jenis dan jumlah bahan pangan, waktu pengambilan dan memilih e-Warong. Alasannya adalah memudahkan pelaksana memonitor dan menjamin ketersediaan barang secara serentak.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan gagasan, inovasi dari bantuan sebelumnya yaitu RASTRA yang hanya menerima bantuan berupa beras dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan mampu memberikan tambahan nutrisi. Artinya masyarakat tidak perlu membeli bahan kebutuhan pangan, seperti telur, ayam, tempe dan lain-lain. Tapi dampaknya adalah bantuan yang diberikan akhirnya tak selalu sesuai kebutuhan dan selera.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan dari pemerintah melalui Menteri Sosial No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang efisiensi diharapkan mampu memberikan manfaat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) meskipun tidak sesuai keinginan masyarakat.

4. Keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria.

Keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria artinya tidak sesuai ketentuan Permensos No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disebutkan pada pasal 5 peserta BPNT yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan social. Pemberian daftar nama calon penerima keluarga manfaat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu dicermati terlebih dahulu kebenarannya dengan melakukan terjun langsung dilapangan yang dilakukan oleh TKSK dalam tujuan pencocokan data yang sesuai dengan kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga yang benar-benar ekonomi rendah. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak bisa menerima bantuan lainnya tidak menutup kemungkinan dari data yang berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 140 orang hanya terealisasi 50 orang yang mendapat bantuan artinya jumlah penerima bantuan 50 orang bisa saja terdapat orang yang tidak masuk dalam kriteria (mampu) karena orang tersebut tidak terdaftar di data penerima bantuan mana saja.

3.5. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada masyarakat Miskin Diera Pandemi Covid 19 Didesa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir

Upaya adalah bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain upaya adalah bagian dari tugas utama dalam menjawab kendala-kendala khususnya program pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa pulung rejo. Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya adalah (1) Partisipasi Dinas Sosial dan masyarakat masih kurang. (2) Penyaluran bantuan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tak sesuai ketentuan. (3) Keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah desa diantaranya adalah Sterilisasi tempat pertemuan dengan menggunakan protokol kesehatan.

1. Upaya Kepala Desa dalam menghadapi Partisipasi Dinas Sosial dan Masyarakat masih kurang

Pemerintah desa pulung rejo terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa korban jiwa. Upayanya ini dilakukan pemerintah Desa Pulung Rejo agar sosialisasi dalam menjalankan program pemerintah yaitu dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat berjalan sesuai dengan tujuan dengan harapan mereka mau datang di acara sosialisasi.

Selanjutnya pemerintah desa melakukan pendekatan preventif kepada masyarakat meyakinkan kepada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk meluangkan waktunya hadir dalam undangan sosialisasi edukasi. Dengan adanya kehadiran masyarakat artinya ikut serta dalam membantu program yang diberikan pemerintah. Antara

lain kepala desa langsung datang kerumah para penerima dengan maksud kunjungan silaturahmi.

Pendekatan preventif adalah pendekatan yang sangat efektif. Pendekatan antara pimpinan dengan masyarakat. Pendekatan preventif pendekatan yang mampu memberikan solusi dari setiap masalah dari pendekatan preventif pemerintah desa mengetahui apa maksud dari keinginan masyarakatnya. Untuk partisipasi dinas sosial yang masih, pemerintah desa berupaya memberikan surat untuk meminta alasan atau pertimbangan tentang ketidakadilan dalam sosialisasi edukasi. Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi kendala-kendala diantaranya kendala mengenai partisipasi dinas sosial dan masyarakat masih kurang diharapkan dengan upaya yang dilakukan pemerintah desa mampu memberikan partisipasi aktif dalam capaian tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa pulung rejo.

2. Penyaluran bantuan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tak sesuai ketentuan/tak sesuai keinginan yang dibutuhkan (Barang, dan berupa uang).

- a. Upaya Pemerintah Desa

Berbicara tentang sesuai atau tidak sembako yang diberikan terhadap penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan yang ditetapkan oleh menteri sosial dalam bentuk sembako dengan tujuan mudah dalam pengawasan dan efisien. Namun dalam prakteknya dijumpai kendala-kendala dimana pemberian sembako ternyata tidak sesuai yang mereka inginkan bahkan tidak banyak dari penerima bantuan menginginkan uang tunai ketimbang sembako. Keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai (BPNT) lebih memilih bantuan berupa uang tunai dibandingkan bantuan berupa barang sembako karena apabila berupa uang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-harinya artinya bukan saja hanya membeli sembako namun juga bisa untuk membeli keperluan sekolah anak.

Sosialisasi komunikasi terhadap penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah pendekatan preventif yang sangat efektif yang merupakan upaya dalam pemerintah desa dengan komunikasi secara langsung. Maka akan memberikan dampak kepada masyarakat yaitu berupa pemahaman terhadap tujuan adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat melalui Dinas sosial untuk meyakinkan kepada masyarakat. Pemerintah desa pulung rejo sebagai penyelenggara bantuan pangan non tunai (BPNT) telah melakukan pergantian sembako pada saat pengambilan dimaksud dengan tujuan agar sembako dapat digunakan atau bermanfaat bagi penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) .

3. Keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria.

Melihat data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa pulung rejo kecamatan rimbo ilir kabupaten tebo dengan jumlah penduduk 2593 orang terdapat kelompok yang berhak menerima bantuan sebanyak 190 orang dari jumlah warga miskin mendapat bantuan 50 orang dengan capai warga miskin yang belum mendapat sebanyak 140 orang artinya 90 orang yang belum terdaftar di data PPKS atau data terpadu penerima bantuan dengan kata lain 50 orang warga miskin sebelumnya memang belum terdaftar di data PPKS sebagai daftar penerima bantuan lainnya seperti BLT atau PKH.

Keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria kemungkinan dapat terjadi karena dari 50 orang warga yang miskin yang mendapatkan terdapat orang kaya yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) karena mereka memang benar-benar belum pernah terdaftar di data PPKS atau data terpadu penerima bantuan. Menanggapi hal diatas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berupaya untuk melakukan pendataan ulang verifikasi data dan divalidasi turun kelapangan yang selanjutnya dilanjutkan ke dinas sosial

untuk diproses. Upaya TKSK dalam hal keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria TKSK telah melakukan tugasnya secara efektif dengan melakukan verifikasi data langsung kelapangan dan melanjutkan ke dinas sosial untuk di validasikan. Apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial agar segera menggantikan dan memberikan terhadap mereka yang benar-benar layak mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin Diera Pandemi Covid-19 Didesa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Tahun 2020 belum berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir belum tepat sasaran dikarenakan masih adanya masyarakat yang kaya mendapat bantuan tersebut.
2. Kendala-kendala dalam Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Kelompok Masyarakat Miskin Diera Pandemi Covid-19 di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir yaitu (1) Partisipasi dinas sosial dan masyarakat masih kurang (2) Penyaluran bantuan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tak sesuai ketentuan. (3) Keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan kriteria.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Evaluasi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu:
 1. Partisipasi dinas sosial dan masyarakat masih kurang
 - a. upaya pemerintah desa pulung rejo
 - i) melalui pendekatan preventif.
 - ii) melalui pendekatan komunikasi sosial antara dinas sosial, desa dan masyarakat.
 2. Penyaluran bantuan Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang tak sesuai ketentuan.

Pemerintah desa Memberikan keyakinan dan penjelasan bahwa bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan perbaikan gizi. Artinya berupa sembako.
 3. Penerima keluarga manfaat yang tidak sesuai kriteria
 - a. Upaya yang dilakukan TKSK
 - i. verifikasi dan validasi data artinya mencocokkan data yang ada dengan kenyataan dengan terjun langsung kelapangan.

Melalui penelitian tentang evaluasi program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) pada kelompok masyarakat miskin di era pandemi covid-19 di desa pulung rejo kecamatan rimbo ilir penulis memberikan saran:
 - ii. Hendaknya e-warong memberikan daftar rincian barang dengan jumlah uang yang diterima.
 - iii. Agar pendistribusian program berjalan sesuai SOP dan mencapai tujuan dengan indikator 6T, para penyelenggara program harus lebih mengoptimalkan kinerjanya.
 - iv. Hendaknya dalam mendata memang diharapkan sesuai dengan kriteria masyarakat miskin agar tidak terjadi kesalahan dalam penerimaan BPNT.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Afifudin dan Saebani. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.

Perundang-undangan

Permensos Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019

Internet

<https://pusdatin.kemsos.go.id/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt>.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10471>

<http://infopublik.id/program-bpnt-diharapkan-tepat-sasaran>.

[https://translate.google.com/COVID 19 pandemic&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/COVID%2019%20pandemic&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search).

<https://implementasi-kebijakan-publik-serta-faktor-keberhasilan-dan-kegagalannya/>.

<https://document/-realisasi-atau-implementasi-suatu-kebijakan-pengertian-program-dan-evaluasi-program.html>